

BAB III

VISI, MISI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, mencerminkan arah serta cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Sumbawa, perumusan visi dan misi menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.

3.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah “*Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera*”.

Makna dari tiga kata kunci dalam Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Unggul: Unggul Sumber dayanya** (meliputi: Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya, Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi, serta Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur), bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa menggunakan Sumber daya yang Unggul (Keunggulan Komparatif atau *Comparative Advantage*) dan sekaligus menghasilkan Sumber daya yang Unggul atau Berdaya Saing (Keunggulan Kompetitif atau *Competitive Advantage*). Keunggulan komparatif sumber daya tersebut menjadi potensi/kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan, sementara keunggulan kompetitif sumber daya tersebut menjadi syarat untuk mampu bersaing dengan produk/sumber daya dari luar.
2. **Maju: Maju Perekonomiannya**, bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk menghasilkan dan/atau mengembangkan Perekonomian yang Maju, ditandai oleh terjadinya diversifikasi dan peningkatan produktivitas berbagai sektor ekonomi (terutama pertanian/agribisnis), tumbuhkembangnya ekonomi industri/agroindustri yang kreatif-inovatif, serta perdagangan/pemasaran produk yang terjamin.
3. **Sejahtera: Sejahtera Masyarakatnya**, bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa ditujukan untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera lahir dan bathin, ditandai oleh tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang rendah, serta ketahanan pangan yang tinggi.

Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul** melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,

- pemberdayaan ketenagakerjaan, kepemudaan dan perempuan, serta transformasi nilai-nilai budaya sebagai pondasi dari daya saing daerah.
2. **Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul** melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), reformasi birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, berdedikasi, berkinerja tinggi dan bersih dari KKN, serta penegakan hukum.
 3. **Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul** melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana, serta pengembangan infrastruktur untuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
 4. **Perekonomian Maju** melalui pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis pada pertanian/agribisnis dan industri/agroindustri dengan dukungan energi sumber daya mineral dan pariwisata yang bernilai tambah dan berdaya saing.
 5. **Masyarakat Sejahtera** melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin (penanggulangan kemiskinan), memperkuat ketahanan pangan Masyarakat, memaksimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mengurangi pengangguran dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

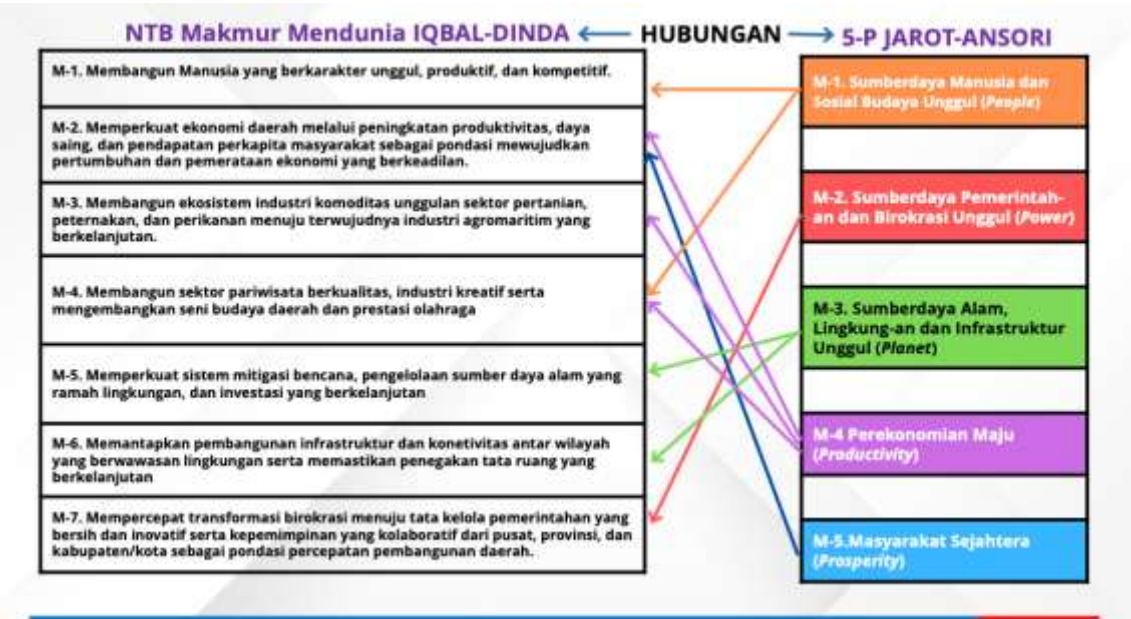
Penyusunan visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 memperhatikan visi dan misi dalam RPJMN tahun 2025-2029. Hubungan antara misi dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa dengan misi dalam RPJMN disajikan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Hubungan antara Misi RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 memperhatikan visi dan misi dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2025-2029. Hubungan antara misi dalam RPJMD

Kabupaten Sumbawa dengan misi dalam RPJMD Provinsi NTB disajikan pada Gambar 3.2 berikut.



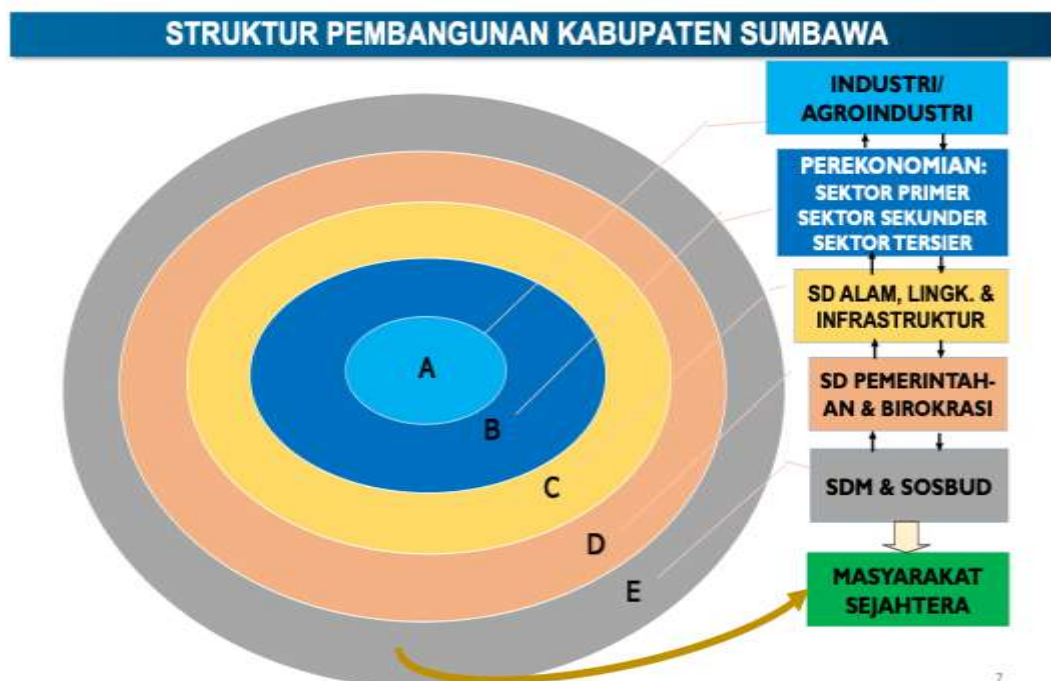
Gambar 3.2 Hubungan antara Misi RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Hubungan antar misi pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan, serta struktur pembangunan Kabupaten Sumbawa berdasarkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029, disajikan pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.3 Hubungan Antarmisi dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Dari Gambar 3.3 diketahui bahwa kelima misi pembangunan Kabupaten Sumbawa saling terkait satu dengan lainnya dalam suatu sistem pembangunan. Pada bagian hulu terdapat tiga kelompok sumber daya (*input*) yang sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya proses (*process*) pada bagian tengah, sehingga dapat diperoleh hasil pembangunan (*ouput, outcome, benefit dan impact*) pada bagian akhir dari sistem. Ketiga kelompok sumber daya tersebut meliputi: sumber daya manusia dan sosial budaya; sumber daya pemerintahan dan birokrasi; serta sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur. Proses yang dimaksud berlangsung melalui aktivitas perekonomian yang terdiri atas tiga kelompok sektor yaitu: primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu hasil pembangunan menjadi indikator penentu kesejahteraan masyarakat. Ketiga komponen sistem tersebut (hulu, tengah dan hilir) harus mampu dikelola (*management*) secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi IMTAQ yang kuat dan IPTEKS yang maju, disertai spirit Percepatan, Inovasi dan Nilai Tambah (PIN).



Gambar 3.4 Struktur Pembangunan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2025-2029

Dari Gambar 3.4 diketahui bahwa inti (*core*) pembangunan Kabupaten Sumbawa adalah sektor industri/agroindustri, dengan pertimbangan dapat menjadi pemicu dan pemacu pembangunan sektor ekonomi lainnya. Percepatan, Inovasi dan Nilai Tambah (PIN) dalam pembangunan sektor industri/agroindustri membutuhkan dukungan sektor ekonomi lain (sektor primer, sekunder dan tersier) yang tersedia memadai di alam, lingkungan dan infrastruktur, perlu dukungan pengelolaan secara terarah oleh pemerintah dan birokrasi, serta membutuhkan dukungan peran serta sumber daya manusia dan sosial budaya yang berkualitas. Pembangunan industri/agroindustri yang berhasil akan berdampak kepada perbaikan kualitas sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Perekonomian wilayah Kabupaten Sumbawa yang dimaksud pada Gambar 3.4 sebagai berikut:

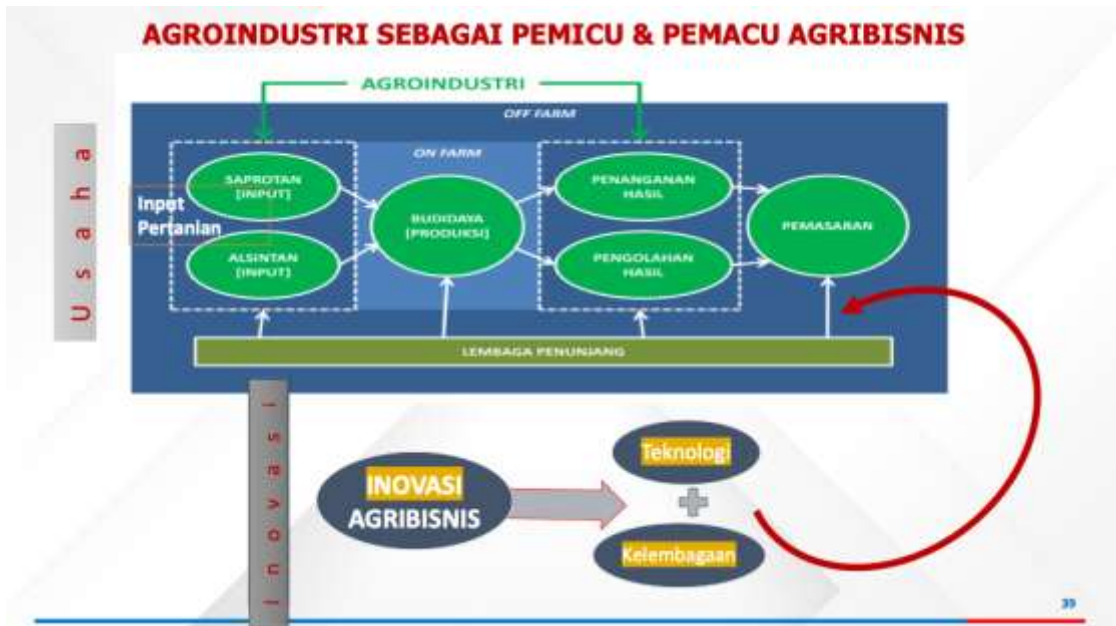
- A. Sektor Primer (2 sektor): (1) Pertanian (dan Perkebunan, Peternakan), Kehutanan, dan Perikanan; dan (2) Pertambangan dan Penggalian.
- B. Sektor Sekunder (3 sektor): (3) Industri Pengolahan (termasuk Agroindustri); (4) Pengadaan Listrik dan Gas; dan (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.
- C. Sektor Tersier (12 sektor): (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa Lainnya.

Industri/agroindustri sebagai pemicu dan pemacu pembangunan, serta contoh terapannya dalam aktivitas perekonomian disajikan pada Gambar 3.5 s.d. Gambar 3.9 berikut.



Gambar 3.5 Industri/Agroindustri sebagai Pemicu dan Pemacu Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Dari Gambar 3.5 diketahui bahwa sektor industri pengolahan (termasuk agroindustri) bersama dengan sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (tergabung sebagai sektor sekunder) mempunyai hubungan ke belakang (*backward linkage*) untuk mendorong pembangunan sektor pertanian arti luas dan pertambangan-penggalian (tergabung sebagai sektor primer), serta mempunyai hubungan ke depan (*forward linkage*) untuk merangsang pengembangan sektor perdagangan dan jasa-jasa lainnya (tergabung sebagai sektor tersier).



Gambar 3.6 Agroindustri sebagai Pemicu dan Pemacu Pembangunan Agribisnis

Dari Gambar 3.6, diketahui bahwa agroindustri merupakan satu dari lima subsistem dalam agribisnis meliputi: penyediaan input pertanian, budidaya/pemeliharaan/penangkapan (produksi) pertanian, penanganan dan pengolahan hasil pertanian (agroindustri), pemasaran hasil, dan lembaga penunjang.



Gambar 3.7 Pohon Industri/Agroindustri Jagung



Gambar 3.8 Pohon Industri/Agroindustri Mangga



Gambar 3.9 Pohon Industri/Agroindustri Sapi

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya (*People, P1*)

1. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang unggul.
2. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang unggul.
3. Terwujudnya pengelolaan ketenagakerjaan, kepemudaan, perempuan, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang unggul.
4. Terwujudnya pengelolaan nilai-nilai budaya dan keamanan yang unggul.

Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi (*Power, P2*)

5. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional.

6. Terwujudnya pemerintahan dan reformasi birokrasi yang akuntabel, bersih dan bebas dari KKN.
7. Terwujudnya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).
8. Terwujudnya perencanaan dan pengawasan pembangunan yang efektif, produktif dan berkelanjutan.

Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur (*Planet, P3*)

9. Terwujudnya pengelolaan penataan ruang dan Kawasan Sentra Produksi (KSP) sesuai keunggulan komparatifnya.
10. Terwujudnya pengelolaan lingkungan (darat/lahan, udara, air/laut) dan persampahan yang aman, nyaman dan berkelanjutan.
11. Tersedianya konektivitas antarwilayah dan infrastruktur wilayah, serta mitigasi dan penanganan bencana sesuai kebutuhan pembangunan.

Perekonomian (*Productivity, P4*)

12. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, terutama agribisnis/ pertanian dan industri/agroindustri sebagai sektor ekonomi dominan.
13. Terwujudnya peningkatannya pendapatan per kapita, terutama karena aktivitas jasa perdagangan.
14. Terwujudnya investasi atau penanaman modal yang produktif dan solutif terhadap ekonomi wilayah.

Kesejahteraan Masyarakat (*Prosperity, P5*)

15. Terwujudnya penurunan tingkat kemiskinan penduduk, serta kuatnya ketahanan dan keragaman pangan.
16. Terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
17. Terwujudnya pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya (*People, P1*)

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pendidikan SDM.
2. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat/SDM.
3. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kewirausahaan tenaga kerja, termasuk pekerja rentan.
4. Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
6. Meningkatkan penghargaan terhadap nilai budaya dan peran kebudayaan dalam pembangunan.
7. Meningkatkan keamanan, kesadaran politik dan demokrasi masyarakat.

Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi (*Power, P2*)

8. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bertugas.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
10. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).
12. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penentu KFD.
13. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.
14. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.
15. Meningkatnya kualitas, efektivitas dan kebermanfaatan pengawasan pembangunan.

Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur (*Planet, P3*)

16. Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
17. Meningkatnya daya dukung dan produktivitas Kawasan Sentra Produksi (KSP).
18. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan (darat/lahan, udara, air/laut).
19. Meningkatnya pengelolaan persampahan yang aman dan terkendali.
20. Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
21. Meningkatnya pembangunan dan/atau pemanfaatan infrastruktur wilayah.
22. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana.

Perekonomian (*Productivity, P4*)

23. Meningkatnya produktivitas agribisnis/pertanian dalam arti luas (tanaman pangan & hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan-kelautan).
24. Meningkatnya industri/agroindustri produk unggulan yang berdaya saing.
25. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.
26. Meningkatnya investasi atau penanaman modal yang produktif (kerjasama pemerintah dan dunia usaha).
27. Meningkatnya aktivitas energi sumber daya mineral dan pariwisata yang mendukung pertanian/agribisnis dan industri/agroindustri.
28. Meningkatnya perdagangan produk unggulan di pasar lokal, regional dan nasional.

Kesejahteraan Masyarakat (*Prosperity, P5*)

29. Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi bagi penduduk miskin.
30. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan.
31. Meningkatnya Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli Masyarakat sebagai komponen IPM.
32. Menurunnya jumlah/tingkat pengangguran terbuka.
33. Menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Indikator dari setiap tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Indikator dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN SUMBAWA YANG UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA

Misi	Tujuan Pemb.	Sasaran Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline Kinerja	Target Kinerja Tahunan							
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1 Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul	1	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan untuk SDM yang unggul	1	Indeks Pendidikan	Point	0.66	0.67	0.67	0.68	0.69	0.83	0.87	
		1) Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan pendidikan SDM	1)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.59	8.758	9.009	9.386	9.951	10.799	12.071	
				2)	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.34	13.41	13.515	13.673	13.909	14.263	14.795
		2	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang unggul	2	Indeks Kesehatan	Point	0.810	0.815	0.819	0.824	0.829	0.833	0.837
			2) Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat/SDM	3)	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.67	72.99	73.30	73.61	73.92	74.23	74.54
				4)	Prevalensi Stunting	%	29,8	23,20	21,55	19,91	18,26	16,62	14,97
		3	Terwujudnya pengelolaan ketenagakerjaan, kepemudaan, perempuan, dan PPKS yang unggul	3	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Point	60.50	62.27	64.10	65.97	67.91	69.90	71.94
				4	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Point	54.42	55.59	56.76	57.92	59.09	60.26	55.6
				5	Indeks Kesejahteraan Sosial	Point	55,53	56,18	56,83	57,48	58,13	58,78	59,43
			3) Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan kewirausahaan tenaga kerja, termasuk pekerja rentan	5)	Tingkat Serapan Tenaga Kerja	%	26,78	27,44	28,12	28,82	29,54	30,27	31,02
				6)	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,92	3,28	3,68	4,14	4,65	5,22	5,86
			4) Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	7)	Laju Peningkatan Prestasi Pemuda dan Atlet Daerah	%	50.00	59.46	63.56	64.25	64.67	65.13	65.89
				8)	Indeks Pembangunan	Point	0.41	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35

Misi	Tujuan Pemb.	Sasaran Pembangunan		Indikator	Satuan	Baseline Kinerja	Target Kinerja Tahunan						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				9) Indeks Perlindungan Anak	Point	58.447	57.09	55.74	54.38	53.03	51.67	50.317	
		5)	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10) Cakupan Layanan Sosial utk PPKS	%	100	100	100	100	100	100	100	
	4	Terwujudnya pengelolaan nilai-nilai budaya dan keamanan yang unggul		6	Tingkat Pemenuhan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD)	Point	50.14	49,16	48,18	47,2	46,22	45,24	44,26
				7	Tingkat Penanganan Konflik Sosial	Poin	100	100	100	100	100	100	100
		6)	Meningkatnya penghargaan terhadap nilai budaya dan peran kebudayaan dalam pembangunan	11)	Cakupan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah	%	50	54.17	64.58	75.00	85.42	93.75	100,00
		7)	Meningkatnya keamanan, kesadaran politik dan demokrasi Masyarakat	12)	Tingkat Pencegahan Konflik Politik dan Demokrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul	5	Terwujudnya ASN yang berkualitas dan profesional	8	Indeks BerAKHLAK	Point	65,3	68,23	71,28	74,48	77,81	81,3	84,94
		8)	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas	13)	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Point	76.54	79.61	82.81	86.13	89.58	93.18	96.92
		9)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	14)	Indeks Pelayanan Publik	Point	3.12	3.19	3.25	3.32	3.38	3.45	3.51
	6	Terwujudnya pemerintahan dan reformasi birokrasi yang akuntabel, bersih dan bebas dari KKN		9	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	73.25	75.5	77.76	80.01	82.26	84.52	86.772
		10)	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15)	Skor Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	66.04	68.83	71.63	74.42	77.22	80.01	82.00

Misi	Tujuan Pemb.	Sasaran Pembangunan		Indikator	Satuan	Baseline Kinerja	Target Kinerja Tahunan						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		11)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	16)	Kategori Nilai IPKD	Kategori	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	7	Terwujudnya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah		10	Indeks KFD	Point	0.94	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
		12)	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	17)	Laju Fiskal Daerah	%	0,941	1,042	1,153	1,277	1,414	1,565	1,733
		13)	Meningkatnya PAD sebagai penentu KFD	18)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,06	10,07	10,48	10,59	10,62	10,55	10,47
	8	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan pembangunan yang efektif, produktif dan berkelanjutan		11	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Point	100	100	100	100	100	100	100
				12	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		14)	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah	19)	Proporsi IKU yang mencapai Target	%	70	100	100	100	100	100	100
				20)	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,54	3,76	3,99	4,21	4,43	4,66	4,88
		15)	Meningkatnya kualitas, efektivitas dan kebermanfaatan pengawasan Pembangunan	21)	Nilai <i>Monitoring controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP)	Angka	60.05	64.34	68.93	73.86	79.13	84.79	90.84
3	Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul	9	Terwujudnya pengelolaan penataan ruang dan Kawasan Sentra Produksi sesuai keunggulan komparatifnya	13	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Poin	100	100	100	100	100	100	100
		16)	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang	22)	Tingkat efektivitas pemanfaatan ruang wilayah	%	85.11	86.36	87.61	88.86	89.11	90.36	91.51

Misi	Tujuan Pemb.	Sasaran Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline Kinerja	Target Kinerja Tahunan						
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		17) Meningkatnya daya dukung dan produktivitas Kawasan Sentra Produksi (KSP)	23) Tingkat kesesuaian komoditas pada KSP	%	80.45	81.90	82.56	83.43	84,52	85.84	86.40	
	10	Terwujudnya pengelolaan lingkungan (darat/ lahan, udara, air/laut) dan persampahan yang aman, nyaman dan berkelanjutan	14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	73.8	75.3	76.8	78.3	79.8	81.3	82.8	
		18) Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan (darat/Lahan, Udara, Air/ laut)	24) Kategori Kualitas Lingkungan Hidup	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
		19) Meningkatnya pengelolaan persampahan yang aman dan terkendali	25) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	Point	40.24	42.24	44.24	46.24	48.24	50.24	52.19	
	11	Tersedianya konektivitas antar wilayah dan infrastruktur wilayah, serta mitigasi dan penanganan bencana sesuai kebutuhan pembangunan	15 Indeks Konektivitas Daerah	Point	89,43	90,71	92,39	93,84	95,28	96,77	97,73	
		20) Meningkatnya konektivitas Infrastruktur kewilayahan	26) Rasio Konektivitas	Point	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	
			27) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Point	5.79	5.98	6.18	6.39	6.6	6.82	7.01	
		21) Meningkatnya pembangunan dan/ atau pemanfaatan infrastruktur wilayah	28) Indeks Infrastruktur Daerah	Point	88.83	89.78	91.76	93.27	94.73	96.27	97.71	
		22) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	29) Indeks Risiko Bencana	Point	135.33	131.66	128	124.33	120.66	116.99	112.55	
4	Perekonomian Maju	12 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, terutama agribisnis/pertanian dan industri/agroindustri sebagai sektor ekonomi dominan	16 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,12	4,08	5,15	6,63	8,49	10,87	13,88	
		23) Meningkatnya Produktivitas Agribisnis/Pertanian dalam arti luas (tanaman pangan & hortikultura, perkebunan, kehutanan,	30) Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan	%	1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,22	1,20	

Misi	Tujuan Pemb.	Sasaran Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline Kinerja	Target Kinerja Tahunan						
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			peternakan, dan perikanan-kelautan)	Perikanan (ADHK)								
		24)	Meningkatnya industri/agroindustri produk unggulan yang berdaya saing	31) Laju pertumbuhan Industri Pengolahan (ADHK)	%	1,56	6,28	6,88	11,16	14,59	17,17	18,88
	13	Terwujudnya peningkatan pendapatan per kapita, terutama karena aktivitas jasa perdagangan		17 PDRB Perkapita	Rp Juta	34,509	36,418	38,996	42,593	47,752	55,525	65,380
		25)	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	32) Tingkat Inflasi	%	1,83	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1
	14	Terwujudnya investasi atau penanaman modal yang produktif dan solutif terhadap ekonomi wilayah		18 Laju Pertumbuhan Investasi	%	- 6,31	6,74	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
		26)	Meningkatnya investasi atau penanaman modal yang produktif (kerjasama pemerintah dan dunia usaha)	33) Nilai Realisasi Investasi	Rp (milyar rupiah)	1.695	1.809	1.945	2.110	2.311	2.554	2.847
		27)	Meningkatnya aktivitas energi sumber daya mineral dan pariwisata yang mendukung pertanian/ agribisnis dan industri/agroindustry	34) Laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian	%	2,85	2,86	2,87	2,89	2,90	2,91	2,92
				35) Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	%	1,19	1,22	1,28	1,37	1,49	1,64	1,82
		28)	Meningkatnya perdagangan produk unggulan di pasar lokal, regional dan nasional	36) Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,57	7,33	10,44	14,03	17,9	22,05	26,19
5 Masyarakat Sejahtera	15	Terwujudnya penurunan tingkat kemiskinan penduduk, serta kuatnya ketahanan dan keragaman pangan		19 Tingkat Kemiskinan	%	12,87	11,83	10,86	9,96	9,11	8,32	7,60
				20 Indeks Ketahanan Pangan	Point	85,82	87,02	88,24	89,47	90,72	91,99	93,28
		28)	Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	37) Cakupan Penduduk Penerima Beasiswa	%	0.11	0.16	0.22	0.27	0.32	0.37	0.42

Misi	Tujuan Pemb.	Sasaran Pembangunan		Indikator	Satuan	Baseline Kinerja	Target Kinerja Tahunan						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						Pendidikan							
				38)	Universal Health Coverage (UHC)	%	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				39)	Universal Coverage Jamsostek (UCJ)	%	21.17	21.23	21.24	21.31	21.43	21.60	21.82
		29)	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	40)	Tingkat Ketahanan dan Keamanan Konsumsi Pangan Daerah	Skor	86,10	87,93	89,8	91,71	93,66	95,65	97,69
	16	Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		21	Indeks Pembangunan Manusia	Point	72.36	73.09	73.91	74.83	75.86	77.01	78.30
		31)	Meningkatnya Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli Masyarakat	41)	Indeks Pendidikan	Point	0.657	0.666	0.673	0.681	0.689	0.833	0.868
				42)	Indeks Kesehatan	Point	0.81	0.815	0.819	0.824	0.829	0.833	0.837
				43)	Purchasing Power Parity (PPP)	Ribu Rupiah	10.349	10.614	10.936	11.258	11.58	11.902	12.224
	17	Terwujudnya Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat		22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2.67	2.41	2.17	1.95	1.76	1.59	1.43
				23	Indeks Gini (Gini Ratio)	Point	0,379	0,337	0,299	0,266	0,237	0,210	0,185
		32)	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	44)	Laju penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30	9,74	9,96	10,14	9,74	9,66	10,06
		33)	Menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat	45)	Laju penurunan ketimpangan pendapatan	%	14,06	11,08	11,28	11,04	10,90	11,39	11,90

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan memuat kerangka pikir yang menjembatani antara sasaran pembangunan dengan rangkaian langkah konkret yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Arah kebijakan menjadi panduan teknis bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan sasaran pembangunan secara terukur.

3.2.1.1 Strategi

Strategi yang ditempuh untuk setiap sasaran pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Strategi pada Setiap Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No.	Misi/Sasaran Pembangunan	Strategi
I.	Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul	
1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan pendidikan SDM	1. Peningkatan pemerataan dan mutu layanan Pendidikan 2. Digitalisasi pendidikan dan peningkatan partisipasi sekolah
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat/ SDM	3. Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar 4. Penguatan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
3	Meningkatnya kapasitas, kualitas dan kewirausahaan tenaga kerja, termasuk pekerja rentan	5. Pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga kerja berbasis kompetensi 6. Penciptaan Peluang Kerja dan Wirausaha Baru
4	Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	7. Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Berbasis Inovasi 8. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan & Anak
5	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	9. Integrasi Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan 10. Pendekatan Komunitas dan Kolaborasi Swasta
6	Meningkatnya penghargaan nilai-nilai budaya dan peran kebudayaan dalam pembangunan	11. Revitalisasi dan Pelestarian Nilai Budaya 12. Pengintegrasian Nilai-nilai Budaya ke dalam Perencanaan Pembangunan
7	Meningkatnya keamanan, kesadaran politik dan demokrasi Masyarakat	13. Edukasi Politik Berbasis Masyarakat 14. Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi
II.	Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul	
8	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN	15. Reformasi Manajemen SDM Aparatur

No.	Misi/Sasaran Pembangunan	Strategi
		16. Penguatan Budaya Kerja dan Disiplin ASN
9	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	17. Percepatan Pelayanan Publik Terintegrasi
		18. Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
10	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19. Implementasi SAKIP
		20. Penyelarasan Perencanaan & Penganggaran Berbasis Kinerja
11	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)	21. Ekstensifikasi & Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
		22. Efisiensi & Pengendalian Belanja Publik
12	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penentu KFD	23. Diversifikasi Sumber PAD
		24. Simplifikasi Regulasi Pajak & Retribusi
13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja & keuangan daerah	25. Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan & Sistem Pengawasan
		26. Transparansi & Partisipasi Publik
14	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah	27. Penguatan Kualitas Dokumen Perencanaan
		28. Integrasi Penyusunan Rencana & Evaluasi
15	Meningkatnya kualitas, efektivitas, dan kebermanfaatan pengawasan pembangunan	29. Peningkatan Kapabilitas APIP & Sistem Pengawasan Internal
		30. Pelibatan Publik dalam Pengawasan
III.	Sumber daya Alam, Lingkungan, dan Infrastruktur Unggul	
16	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang	31. Optimalisasi Dokumen RTRW/RDTR dan Penegakan Hukum
		32. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah & Partisipasi Masyarakat terkait tata ruang
17	Meningkatnya daya dukung & produktivitas Kawasan Sentra Produksi (KSP)	33. Penyediaan Infrastruktur Dasar & Fasilitas Pendukung KSP
		34. Penguatan Kelembagaan Petani/ Peternak/ Nelayan
18	Meningkatnya kualitas & daya dukung lingkungan (darat/lahan, udara, air/laut)	35. Rehabilitasi & Konservasi Ekosistem Darat & Laut
		36. Pengendalian Pencemaran & Penegakan Hukum Lingkungan
19	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang aman & terkendali	37. Penguatan Infrastruktur Persampahan
		38. Kampanye 3R & Partisipasi Masyarakat
20	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	39. Pengembangan Transportasi Darat, Laut, Udara Terintegrasi
		40. Penguatan <i>Digital Connectivity</i>
21	Meningkatnya pembangunan dan/atau pemanfaatan infrastruktur wilayah	41. Prioritas Infrastruktur Dasar Berbasis Kebutuhan Sektor
		42. Pendanaan Inovatif & KPBU (Kerja Sama Pemerintah–Badan Usaha)
22	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	43. Mitigasi & Kesiapsiagaan Bencana
		44. Penanganan Darurat Bencana & Rehabilitasi
IV.	Perekonomian Maju	

No.	Misi/Sasaran Pembangunan	Strategi
23	Meningkatnya produktivitas agribisnis/pertanian dalam arti luas	45. Intensifikasi & Ekstensifikasi Pertanian Modern 46. Pengembangan Lembaga Ekonomi Petani
24	Meningkatnya industri/agroindustri produk unggulan yang berdaya saing	47. Hilirisasi Komoditas Pertanian Pangan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Kelautan-Perikanan 48. Sertifikasi & Standarisasi Mutu Produk
27	Meningkatnya investasi atau penanaman modal yang produktif	49. Peningkatan Iklim Investasi & Kemudahan Berusaha 50. Promosi Investasi Terfokus & Sinergi Swasta
26	Meningkatnya aktivitas energi sumber daya mineral dan pariwisata yang mendukung pertanian/agribisnis dan industri/agroindustri	51. Pengembangan Potensi Energi Terbarukan & Pertambangan Ramah Lingkungan 52. Penguatan Sektor Pariwisata Terpadu
27	Meningkatnya perdagangan produk unggulan di pasar lokal, regional, & nasional	53. Perluasan Pasar Lokal, Domestik & Antarpulau 54. Pembenahan Tata Niaga & Promosi Terpadu
V.	Masyarakat Sejahtera	
28	Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi bagi penduduk miskin	55. Integrasi Bantuan Sosial Berbasis Data Terpadu 56. Peningkatan Layanan Dasar Gratis/Subsidi
29	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	57. Diversifikasi Pangan Lokal & Ketersediaan Pangan 58. Penguatan Sistem Distribusi & Pencegahan Krisis Pangan
30	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	59. Pengendalian Inflasi Daerah 60. Peningkatan Efisiensi Distribusi kebutuhan pokok
31	Meningkatnya Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, & Indeks Daya Beli sebagai komponen IPM	61. Percepatan Perbaikan Mutu Pendidikan 62. Percepatan Perbaikan Mutu Kesehatan 63. Peningkatan Daya Beli melalui Stabilitas Pendapatan
32	Menurunnya jumlah/tingkat pengangguran terbuka	64. Kolaborasi Penempatan Kerja & Cipta Lapangan Kerja Baru 65. Penguatan Layanan Informasi Pasar Kerja & Bimbingan Karier
33	Menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat	66. Peningkatan kapasitas usaha mikro kecil (UMK) 67. Jalinan kemitraan usaha antar pelaku ekonomi

Keterangan:

- Sasaran: Merujuk pada outcome yang ingin dicapai.
- Strategi: rencana komprehensif, mencakup langkah besar untuk memenuhi sasaran.

3.2.1.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan pembangunan. Arah kebijakan yang seiring dengan strategi untuk setiap sasaran pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Seiring Strategi untuk Setiap Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No.	Misi/Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan
I.	Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul	
1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan pendidikan SDM	1. Perbaikan infrastruktur sekolah (terutama di daerah terpencil). 2. Redistribusi guru, peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik 3. Penguatan kurikulum kejuruan/vokasi untuk mencetak SDM siap kerja. 4. Pengembangan platform <i>e-learning</i> dan pelatihan guru dalam literasi digital 5. Beasiswa/dukungan operasional bagi siswa tidak mampu. 6. Program Sekolah Tuntas 12 Tahun (kampanye putus sekolah nol).
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat/SDM	7. Perbaikan fasilitas Puskesmas, Poskesdes, serta peningkatan kapasitas tenaga medis 8. Optimalisasi promotif–preventif (penurunan stunting, imunisasi, gizi seimbang). 9. Digitalisasi rekam medis dan perluasan cakupan jaminan kesehatan. 10. Pemetaan epidemiologi dan penguatan layanan rujukan regional. 11. Kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di keluarga dan sekolah. 12. Penyediaan laboratorium diagnostik dasar di kecamatan prioritas 13. Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). 14. Pelayanan Dasar Melalui Posyandu.
3	Meningkatnya kapasitas, kualitas dan kewirausahaan tenaga kerja, termasuk pekerja rentan	15. Kolaborasi dengan industri, BLK, dan perguruan tinggi untuk pelatihan vokasi. 16. Penguatan bursa kerja dan job fair lintas kecamatan 17. Perlindungan pekerja rentan melalui skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).
4	Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	18. Akselerasi program wirausaha muda (inkubasi UMKM, pendampingan usaha mikro). 19. Kredit lunak atau dana bergulir bagi usaha pemula 20. Pengembangan <i>creative hub</i> (ruang kolaborasi) dan pelatihan startup digital. 21. Pelibatan pemuda dalam program desa cerdas (<i>smart village</i>) dan BUMDes, serta Implementasi Koperasi Merah Putih. 22. Pelatihan keterampilan ekonomi dan permodalan mikro bagi perempuan. 23. Penguatan Layanan Terpadu PPA (Perlindungan Perempuan & Anak). 24. Kampanye edukasi pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan sekolah. 25. Validasi dan pemutakhiran DTKS
5	Berkurangnya jumlah Pemerlu	26. Pendampingan personal terhadap lansia,

No.	Misi/Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan
	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	disabilitas, anak jalanan
		27. Koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk mencegah duplikasi bantuan sosial.
		28. Kemitraan CSR dengan perusahaan untuk fasilitas rehabilitasi PPKS .
		29. Pengembangan sistem rujukan layanan PPKS ke NGO/lembaga sosial.
6	Meningkatnya penghargaan nilai-nilai budaya dan peran kebudayaan dalam pembangunan	30. Pemberdayaan lembaga adat, sanggar budaya, dukungan event kebudayaan di desa.
		31. Dokumentasi dan digitalisasi naskah/situs budaya.
		32. Kolaborasi kegiatan kebudayaan dengan pariwisata (festival budaya, pameran).
		33. Pembentukan desa wisata berbasis budaya.
		34. Peta jalan pemajuan kebudayaan
		35. Insentif bagi pelaku seni-budaya yang berkontribusi pada pariwisata.
		36. Pengembangan festival tahunan yang memadukan adat, musik, dan kuliner.
7	Meningkatnya keamanan, kesadaran politik dan demokrasi Masyarakat	37. Penguatan moderasi beragama dan toleransi di masyarakat.
		38. Pemberian insentif kepada petugas keagamaan dan pengamanan aktivitas sosial kemasyarakatan
		39. Kolaborasi KPU/Bawaslu untuk penyuluhan pemilu partisipatif.
		40. Optimalisasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
		41. Forum diskusi publik rutin (mini-musrenbang) dalam perumusan kebijakan.
II.	Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul	
8	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN	42. Rekrutmen & promosi berbasis kompetensi (sistem merit).
		43. Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis Perangkat Daerah.
		44. Implementasi reward & punishment berbasis kinerja.
9	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	45. Kampanye Zona Integritas(ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
		46. Implementasi e-Service (pelayanan daring) di perizinan, kependudukan, dll.
		47. Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP).
		48. Pengawasan internal & penilaian kepuasan masyarakat berkala.
10	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	49. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap Perangkat Daerah
		50. Evaluasi kinerja berkala, pelaporan berbasis aplikasi online
		51. Integrasi <i>e-Planning</i> , <i>e-Budgeting</i> , dan <i>e-Monev</i> .
		52. Pelibatan masyarakat & akademisi dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
11	Meningkatnya Kapasitas Fiskal	53. Optimalisasi pajak & retribusi via pemutakhiran

No.	Misi/Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan
	Daerah (KFD)	data wajib pajak.
		54. Peningkatan pengelolaan aset daerah (sewa, kemitraan) untuk PAD.
		55. Penerapan <i>zero-based budgeting</i> di Perangkat Daerah tertentu.
12	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penentu KFD	56. Inovasi retribusi jasa layanan (pariwisata, parkir) dengan mekanisme digital.
		57. Pengembangan BUMD (air minum, energi, pariwisata).
		58. Revisi Perda pajak & retribusi agar ramah pelaku usaha.
13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja & keuangan daerah	59. Meningkatkan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan.
		60. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi & tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
		61. Publikasi laporan keuangan & kinerja di laman resmi.
		62. Forum konsultasi publik dalam rancangan APBD & realisasi belanja.
14	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah	63. Penerapan analisis data berbasis <i>evidence</i> (musrenbang digital).
		64. Sinkronisasi RPJPD, RPJMD, Renstra, & RKPD.
		65. Pembentukan tim lintas Perangkat Daerah untuk evaluasi realisasi program.
		66. Penggunaan <i>dashboard Monev daring</i> .
15	Meningkatnya kualitas, efektivitas, dan kebermanfaatan pengawasan Pembangunan	67. Rekrutmen auditor bersertifikat, pengembangan infrastruktur pengawasan.
		68. Mekanisme <i>whistleblowing system</i> di Perangkat Daerah
		69. Kerja sama dengan perguruan tinggi & media (audit sosial).
III.	Sumber daya Alam, Lingkungan, dan Infrastruktur Unggul	
16	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang	70. Finalisasi dan sosialisasi RTRW/RDTR kawasan prioritas.
		71. Penindakan tegas pelanggaran tata ruang (penggunaan lahan).
		72. Tim pengendali pemanfaatan ruang di kabupaten/kecamatan.
17	Meningkatnya daya dukung & produktivitas Kawasan Sentra Produksi (KSP)	73. Pembangunan jalan produksi, jaringan irigasi, listrik di KSP.
		74. Gudang, <i>cold storage</i> , dan rantai pasok di sentra produksi.
		75. Adopsi teknologi pertanian/peternakan/perikanan presisi.
18	Meningkatnya kualitas & daya dukung lingkungan (darat/lahan, udara, air/laut)	76. Rehabilitasi hutan lindung, lahan kritis, ekosistem pantai (mangrove).
		77. Perlindungan terumbu karang dan pembatasan penangkapan ikan destruktif.
		78. Pengawasan baku mutu limbah industri,

No.	Misi/Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan
		penertiban tambang liar
		79. Pengembangan laboratorium lingkungan untuk pemantauan air/udara
19	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang aman & terkendali	80. Pembangunan TPS 3R di kecamatan prioritas, penambahan armada sampah.
		81. Pengembangan TPA berkonsep <i>sanitary landfill</i> .
		82. Pembentukan bank sampah di desa/kelurahan, pelatihan daur ulang UMKM.
20	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	83. Peningkatan jalan kabupaten dan revitalisasi pelabuhan laut.
		84. Konsolidasi trayek transportasi umum antar kecamatan
		85. Perluasan jaringan internet ke desa terpencil.
		86. Kerja sama dengan operator telekomunikasi (4G/5G).
21	Meningkatnya pembangunan dan/atau pemanfaatan infrastruktur wilayah	87. Sinkronisasi pembangunan jembatan, embung, & irigasi dengan agribisnis.
		88. Peningkatan jaringan air bersih, sanitasi, & listrik untuk perumahan rakyat.
		89. Menyusun proposal KPBU untuk proyek infrastruktur strategis
		90. Partisipasi swasta dalam pengelolaan infrastruktur
22	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	91. Peta rawan bencana (banjir, longsor, tsunami) & sistem peringatan dini.
		92. Penguatan BPBD & pelatihan relawan desa tangguh bencana.
		93. Peningkatan stok logistik bencana, peralatan evakuasi
		94. Koordinasi dengan TNI/Polri, NGO, & masyarakat pasca-bencana.
IV.	Perekonomian Maju	
23	Meningkatnya produktivitas agribisnis/pertanian dalam arti luas	95. Benih unggul, pupuk bersubsidi tepat sasaran, alsintan.
		96. Klaster pertanian (padi, jagung, sapi), <i>pilot integrated farming</i> .
		97. Mendorong korporatisasi petani/nelayan (BUMDes, co-op).
		98. Promosi hasil pertanian unggulan (pameran, e-commerce).
24	Meningkatnya industri/agroindustri produk unggulan yang berdaya saing	99. Pendirian industri pengolahan produk unggulan (pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan).
		100. Insentif fiskal bagi industri lokal berekspor.
		101. Fasilitasi sertifikasi SNI, Halal, HACCP.
		102. Peningkatan kapasitas lembaga pengujian mutu kabupaten
25	Meningkatnya investasi atau penanaman modal yang produktif	103. Penyederhanaan perizinan via layanan terpadu (OSS daerah).
		104. Database potensi investasi (geospasial, potensi lahan).
		105. <i>Investor Gathering</i> skala nasional/regional, materi promosi proyek.
26	Meningkatnya aktivitas energi sumber daya mineral dan	106. Pemanfaatan minihidro, surya, dan penertiban tambang ilegal.

No.	Misi/Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan
	pariwisata yang mendukung pertanian/agribisnis dan industri/agroindustry	
		107. Insentif bagi investor energi bersih.
		108. Pembenahan destinasi wisata (akses, atraksi, amenitas), sertifikasi CHSE.
		109. Pengembangan desa wisata & promosi digital.
27	Meningkatnya perdagangan produk unggulan di pasar lokal, regional, & nasional	110. Penguatan distribusi (kerja sama antar kabupaten) komoditas unggulan.
		111. Penggunaan platform daring (marketplace) bagi UMKM.
		112. Penataan pasar tradisional (standar higienis & pengelolaan modern).
		113. Dukungan pameran dagang (<i>trade expo</i>) local, regional, nasional.
V.	Masyarakat Sejahtera	
28	Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan, & sosial bagi penduduk miskin	114. Pemetaan sasaran & penyaluran bansos tepat sasaran (melalui DTKS).
		115. Beasiswa keluarga miskin, subsidi iuran BPJS bagi <i>non covered</i> .
		116. Paket gizi tambahan bagi ibu hamil & balita kurang gizi.
		117. Implementasi Sekolah Rakyat (SR)
29	Meningkatnya ketahanan & keragaman konsumsi pangan	118. Pengembangan pangan alternatif (sorghum, umbi), lahan pekarangan
		119. Cadangan pangan daerah (gudang BULOG mini).
		120. Pengawasan rantai pasok bahan pangan (kemitraan petani-pedagang).
30	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	121. Peran aktif TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
		122. Operasi pasar dan subsidi transportasi komoditas melonjak.
		123. Kerja sama antardaerah menjaga kestabilan pasokan
31	Meningkatnya Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan & Indeks Daya Beli sebagai komponen IPM	124. Sekolah Unggul (akreditasi, guru, fasilitas digital).
		125.? pendidikan
		126. Pemberantasan penyakit menular dan imunisasi.
		127.? kesehatan
		128. Dukungan UMKM dan wirausaha pemula ciptakan lapangan kerja baru.
		129. Skema subsidi harga pangan pokok di pasar tradisional.
32	Menurunnya jumlah/tingkat pengangguran terbuka	130. MOU dengan perusahaan regional penyerapan tenaga kerja.
		131. Pengembangan wirausaha sosial di desa
		132. Platform daring bursa kerja kabupaten, integrasi data lulusan SMK.
		133. Pendampingan intensif pencari kerja muda (vokasi dan magang).
33	Menurunnya ketimpangan pendapatan antar Masyarakat	134. Pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil (UMK)

No.	Misi/Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan
		135. Penciptaan kerjasama/kemitraan usaha antara pengusaha menengah/besar dengan pelaku UMK.

3.2.1.3 Pentahapan Pembangunan

Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan Kepala Daerah. Tahapan pembangunan ini disajikan untuk keseluruhan periode RPJMD (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Penambahan masa transisi ini sangat penting untuk memastikan seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam rencana pembangunan berikutnya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mampu melakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan, serta program/kegiatan secara terukur, memperkuat dukungan kelembagaan, dan memastikan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Pentahapan pembangunan secara umum dan masing-masing misi serta tujuan pembangunan disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

Misi Pembangunan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
Prioritas Pembangunan secara Umum (<i>General Priority</i>)	Membangun landasan regulasi, data, dan infrastruktur dasar; menyiapkan sistem.	Mempercepat implementasi program prioritas; memperluas cakupannya	Memantapkan capaian; fokus peningkatan daya saing daerah dan pemenuhan target menengah.	Diversifikasi dan pemantapan cakupan layanan publik; penajaman industri dan pasar, serta infrastruktur; adaptasi iklim	Konsolidasi seluruh capaian; menuntaskan target RPJMD; mempersiapkan transisi ke periode selanjutnya	Tahun 2030 merupakan tahun transisi dan harmonisasi.
Misi-1: Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul	(1) Pendidikan: Regulasi mutu guru (penempatan, rekrutmen), infrastruktur SD, digitalisasi awal	Pendidikan: Kurikulum SD, SMP unggulan, penambahan guru mapel kritis	Pendidikan: Literasi digital & STEM, peningkatan akreditasi sekolah menengah	Pendidikan: Kembangkan metode belajar, guru bersertifikasi.	Pendidikan: Pemantapan akreditasi "B," beasiswa.	Pada tahun 2030, SDM & Sosbud Unggul difokuskan untuk mengevaluasi dan menyatukan hasil-hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan perempuan, serta nilai budaya dan keamanan. Tahun transisi ini memungkinkan penyesuaian kebijakan agar lebih selaras dengan RPJMD berikutnya, termasuk
	(2) Kesehatan: Renovasi Puskesmas prioritas, peta jalan stunting, perluasan Jaminan Kesehatan Daerah.	Kesehatan: Puskesmas rawat inap, intensifikasi stunting (pos gizi, posyandu remaja), integrasi data kesehatan digital.	Kesehatan: Konsolidasi UHC, kapasitas RSUD, kampanye GERMAS.	Kesehatan: Sistem rujukan kabupaten–kecamatan, KIA terpadu, penurunan signifikan penyakit menular.	Kesehatan: <i>Telemedicine</i> , stunting di bawah standar nasional.	
	(3) Ketenagakerjaan, Pemuda & Perempuan: Pembentukan tim lintas sektor (pelatihan vokasi dasar), sinkronisasi data PPKS	Ketenagakerjaan, Pemuda & Perempuan: Pelatihan kompetensi lebih luas, permodalan wirausaha, layanan terpadu PPA.	Ketenagakerjaan, Pemuda & Perempuan: Penguatan BLK kabupaten, wirausaha pemuda, perlindungan perempuan & anak.	Ketenagakerjaan, Pemuda & Perempuan: Standar kompetensi tenaga kerja, akses TKI/TKW formal, pelatihan wirausaha perempuan.	Ketenagakerjaan. Pemuda & Perempuan: Meminimalkan pengangguran, naikan proporsi tenaga kerja bersertifikasi.	
	(4) Nilai budaya & Keamanan:	Nilai budaya & Keamanan:	Nilai budaya & Keamanan:	Nilai budaya & Keamanan:	Nilai budaya & Keamanan:	

Misi Pembangunan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
	<i>Grand design</i> budaya, forum kewaspadaan dini antardesa.	Perda budaya, festival tahunan, deteksi konflik sosial.	Acara budaya tahunan, satgas anti-kenakalan remaja.	Event budaya internasional, kriminalitas menurun.	Ekosistem budaya kokoh, keamanan tinggi	menampung hasil evaluasi dari semua bidang SDM & sosial budaya.
Misi-2: Sumber-daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul	(5) Profesionalisme ASN: Pemetaan kompetensi, diklat prioritas, rintisan sistem merit.	Profesionalisme ASN: Diklat intensif (kepemimpinan/pelayan), SKP terukur.	Profesionalisme ASN: Karier berbasis kompetensi, reward & punishment.	Profesionalisme ASN: Ada 60% jabatan fungsional diisi ASN kompeten.	Profesionalisme ASN: Pimpinan Tinggi bersertifikasi, karier minim intervensi.	Di tahun 2030, Pemerintahan & Birokrasi Unggul difokuskan untuk mengintegrasikan semua hasil reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang telah dicapai. Dengan masa transisi, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan struktur dan sistem pengelolaan keuangan agar siap memasuki periode RPJMD berikutnya.
	(6) Tata Kelola &RB: SOP layanan publik di OPD inti, e-Planning & e-Budgeting awal	Tata Kelola & RB: E-Gov (e-SAKIP) lebih sempurna, naikkan peringkat SAKIP OPD	Tata Kelola & RB: Target “BB”/“A” SAKIP, perluasan e-Pelayanan.	Tata Kelola & RB: OPD min. “BB” (SAKIP), e-Gov terintegrasi (SPBE).	Tata Kelola & RB: SAKIP kabupaten “A,” akuntabilitas tinggi.	
	(7) Kapasitas Fiskal: Intensifikasi pajak/retribusi, verifikasi aset.	Kapasitas Fiskal: Naikkan PAD (retribusi, aset), kemitraan BUMD–swasta.	Kapasitas Fiskal: Pendapatan naik (pengelolaan aset, penataan pajak), efisiensi belanja.	Kapasitas Fiskal: PAD meningkat pesat, kepastian hukum aset optimal.	Kapasitas Fiskal: Peningkatan PAD signifikan, transfer pusat berkurang.	
	(8) Perencanaan & Pengawasan: Integrasi dokumen, tim Monev, penguatan Inspektorat.	Perencanaan & Pengawasan: Integrasi data perencanaan, kapabilitas APIP meningkat.	Perencanaan & Pengawasan: Sinkronisasi Renstra–RKPD, monev real-time.	Perencanaan & Pengawasan: Partisipasi masyarakat evaluasi program, tindak lanjut pengawasan.	Perencanaan & Pengawasan: Laporan Kinerja RPJMD, rancangan teknokratik selanjutnya.	
	(9) Penataan Ruang	Penataan Ruang &	Penataan Ruang &	Penataan Ruang &	Penataan Ruang &	Pada tahun 2030,

Misi Pembangunan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
Misi-3: Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul	& KSP: RTRW–RDTR selaras, pilot KSP pertanian/peternakan	KSP: Infrastruktur dasar (jalan, irigasi, gudang) di KSP prioritas, pengawasan tata ruang ketat.	KSP: KSP tahap lanjut (pascapanen, pemasaran), penindakan pelanggaran ruang.	KSP: Ekspansi KSP (tani, industri, pariwisata).	KSP: KSP terintegrasi, penegakan tata ruang, pelanggaran lahan minimal.	Alam, Lingkungan & Infrastruktur memerlukan penyesuaian antara rencana tata ruang, kelanjutan rehabilitasi lingkungan, dan implementasi rencana infrastruktur jangka menengah berikutnya. Masa transisi memastikan rancangan penataan ruang, upaya pengendalian pencemaran dan penyediaan infrastruktur berlanjut, sehingga hambatan pada periode berikutnya dapat diminimalkan.
	(10) Lingkungan & Persampahan: Master plan, bank sampah, rehabilitasi lahan kritis.	Lingkungan & Persampahan : Bangun TPST, TPS3R dengan tata kelola yang optimal dan Pengembangan Laboratorium LH	Lingkungan & Persampahan: Kapasitas TPA (<i>sanitary landfill</i>), kampanye 3R, penanaman mangrove	Lingkungan & Persampahan: Sampah >70% terkelola 3R, reboisasi lahan kritis, kendali pencemaran air.	Lingkungan & Persampahan: Pengurangan sampah >80%, program kota/desa hijau, kendali pencemaran industri.	
	(11) Infrastruktur: Pendataan jalan/jembatan, rencana induk transportasi, jalan produksi ke sentra tani.	Infrastruktur: Bangun/tingkatkan jalan kabupaten, perluas air bersih di wilayah rawan.	Infrastruktur: Jalan strategis kabupaten, pelabuhan antarprovinsi, listrik desa 100%.	Infrastruktur: Transportasi publik, digitalisasi layanan, internet cepat di desa.	Infrastruktur: Selesaikan infrastruktur prioritas (jalan, jembatan, air, listrik), rencana 2030–2034.	
Misi-4: Perekonomian	(12) Agribisnis/ Pertanian:	Agribisnis/ Pertanian:	Agribisnis/ Pertanian:	Agribisnis/ Pertanian:	Agribisnis/ Pertanian:	Dalam tahun 2030, Perekonomian

Misi Pembangunan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
Maju	Pendataan komoditas, intensifikasi lahan	Klaster agribisnis (kemitraan petani– <i>offtaker</i>), <i>integrated farming</i> .	Skala produksi klaster, teknologi presisi.	Konsolidasi lahan, ekosistem <i>agritech</i> (penyuluh digital).	Integrasi jaringan internal & eksternal, digitalisasi pertanian/Agribisnis.	Unggul akan meninjau kembali efektivitas klaster agribisnis, kawasan industri, dan promosi investasi. Tahun transisi ini diperlukan untuk memantapkan kolaborasi pelaku usaha, menilai kinerja rantai pasok, serta menyesuaikan prioritas ekonomi di RPJMD mendatang sesuai dinamika pembangunan dan pasar
	(13) Industri & Perdagangan: Potensi agroindustri, review perizinan, lahan industri kecil/ agroindustri.	Industri & Perdagangan: Industri agro kecil–menengah, standarisasi mutu (SNI, Halal), ekspansi antar pulau	Industri & Perdagangan: Kawasan industri kecil beroperasi, standarisasi ekspor, <i>marketplace</i> daring.	Industri & Perdagangan: Rantai pasok industri olahan (jagung, sapi, ikan), ekspor meningkat.	Industri & Perdagangan: Produk olahan Sumbawa menembus pasar internasional.	
	(14) Investasi: OSS perizinan, promosi investasi, identifikasi infrastruktur investor.	Investasi: Pelatihan PTSP, promosi intensif (roadshow), lahan industri terpadu.	Investasi: Kerja sama investasi pabrik pakan/cold storage, infrastruktur penunjang.	Investasi: Energi terbarukan (mini-hidro, surya), klaster pariwisata terpadu.	Investasi: Ekosistem investasi kondusif, investor strategis di energi, pariwisata, manufaktur.	
Misi-5: Kesejahteraan Masyarakat	(15) Pengentasan Kemiskinan & Ketahanan Pangan: Validasi data miskin/rentan, integrasi bansos, fokus kemiskinan ekstrem.	Pengentasan Kemiskinan & Ketahanan Pangan: Pemberdayaan produktif (<i>microfinance</i> , inkubasi UMKM).	Pengentasan Kemiskinan & Ketahanan Pangan: Integrasi data sosial & pemberdayaan, kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan & Ketahanan Pangan: Konsolidasi pendanaan (APBD, CSR), desa mandiri via BUMDes.	Pengentasan Kemiskinan & Ketahanan Pangan: Kemiskinan umum & ekstrem mendekati nol, perlindungan sosial inovatif.	Tahun 2030 menjadi momen evaluasi & penyesuaian arah kebijakan Kesejahteraan Masyarakat. Penanganan kemiskinan,

Misi Pembangunan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
	(16) IPM: Kampanye sekolah 12 tahun, kampanye hidup sehat.	IPM: Perluasan beasiswa & kesehatan ibu-anak	IPM: RLS >9 tahun, upaya daya beli.	IPM: Perbaikan dimensi kesehatan (AHH), stabilnya RLS & daya beli	IPM: Capai target (IPM >70), stabil di pendidikan, kesehatan, daya beli.	peningkatan IPM, dan penurunan TPT dianalisis menyeluruh untuk menyiapkan kebijakan lebih adaptif di RPJMD berikutnya.
	(17) Pengangguran & ketimpangan: Pelatihan kewirausahaan & vokasi pemuda, kerja sama BUMN/swasta.	Pengangguran & ketimpangan: Kolaborasi perusahaan besar, permodalan startup lokal.	Pengangguran & ketimpangan: Magang industri-lokal, UMKM inkubasi.	Pengangguran & ketimpangan: Penempatan kerja luar daerah, SMK terserap industri 70–80%.	Pengangguran & ketimpangan: TPT rendah, pekerjaan layak/wirausaha mandiri.	

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Kerangka perumusan program prioritas disajikan pada Gambar 3.10 berikut.



Gambar 3.10 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD

Dari Gambar 3.10 diketahui bahwa setiap sasaran kinerja dipecah secara terstruktur dari level paling strategis (visi dan misi) hingga outcome, lalu diterjemahkan ke dalam program secara lebih fokus (disebut program prioritas). Selanjutnya, pada tiap level dilakukan penetapan indikator yang sesuai dengan skala dan konteks kinerja tersebut, sehingga memudahkan pengukuran pencapaian dan monitoring pelaksanaannya. Melalui pendekatan *cascading* kinerja, maka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan outcome lebih terjaga, karena program prioritas dirumuskan berdasarkan capaian kinerja di setiap jenjang, bukan berlandaskan daftar indikator yang berdiri sendiri.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas disajikan pada **Tabel 3.5**. Melalui tabel tersebut, tahapan perumusan mulai dari pandangan strategis (visi) hingga langkah operasional (program prioritas) dapat dilihat dengan jelas, sehingga arah pembangunan tetap konsisten. Pada setiap misi ditetapkan serangkaian tujuan, kemudian dipecah lagi menjadi sasaran, untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mendukung perwujudan visi dan misi. Akhirnya, program prioritas dirancang secara tepat agar mampu menjawab sasaran dan tujuan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan memantau kinerja. Dengan mengintegrasikan semua elemen tersebut ke dalam satu tabel, pemangku kepentingan dapat menelusuri keselarasan kebijakan dan menghindari tumpang tindih program, sehingga tercipta sebuah kerangka pembangunan yang lebih efektif dan akuntabel.

Tabel 3.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

VISI: Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul Maju dan Sejahtera

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	
1 Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya Unggul	1	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan untuk SDM yang unggul		Indeks Pendidikan		
		1)	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan pendidikan SDM	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah		
			1	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1 Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	PAUD Holistik Integratif
					Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	
					Persentase anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	
			2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	2 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Literasi Digital
			3	Meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pendidikan Tinggi	3 Persentase masyarakat tamat SMA/SMK/MA (usia 19-30 thn) yang mendapat beasiswa dalam pendidikan tinggi (ikut kuliah)	Beasiswa Pendidikan
	2	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang unggul		Indeks Kesehatan		
		2)	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat/ SDM	Usia Harapan Hidup Prevalensi Stunting		
			4	Meningkatnya Pemenuhan Sumber Daya Penunjang Layanan Kesehatan	4 Cakupan Sarpras Faskes Baik sesuai Standar	STBM Tuntas untuk Pilar: Stop Buang Air Besar
			5	Optimalnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian PM dan PTM	5 Prevalensi PTM-PM	Sembarangan/Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun,
			6	Optimalnya Implementasi dan Pemenuhan Lima Pilar Program STBM	6 Tingkat Penuntasan 5 Pilar STBM	Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah tangga
			7	Terpenuhinya Kualitas dan Kuantitas Standar Layanan Faskes	7 Cakupan Faskes Terakreditasi Paripurna	Rumah Sakit Tuntas dan melayani

MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR		PROGRAM PRIORITAS		
						17	Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	17	Cakupan Warisan Budaya yang dilestarikan	Apresiasi Nilai Budaya		
						18	Meningkatnya Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	18	Cakupan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan			
				7)	Meningkatnya kemandirian, kesadaran politik dan demokrasi Masyarakat				Tingkat Pencegahan Konflik Politik dan Demokrasi			
						19	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan peningkatan kapasitas IPTEK	19	Cakupan Pokmas & Ormas yang mengikuti pendidikan karakter kebangsaan	Insentif Imam Masjid dan Guru Ngaji.		
						20	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	20	Cakupan Pokmas & Ormas yang mendapatkan pembinaan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan			
2	Sumberdaya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul	5	Terwujudnya ASN yang berkualitas dan profesional						Indeks BerAKHLAK			
			8)	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas				Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN				
						21	Meningkatnya kualifikasi ASN	21	Indeks Kualifikasi ASN	ASN Profesional, Bersih dan Melayani.		
						22	Meningkatnya kinerja ASN	22	Indeks Kinerja ASN			
						23	Meningkatnya disiplin ASN	23	Indeks Disiplin ASN			
						24	Meningkatnya kompetensi ASN	24	Indeks Kompetensi ASN			
					9)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat			Indeks Pelayanan Publik			
							25	Terselenggaranya pelayanan publik sesuai NSPK	25	Nilai Kepuasan Masyarakat		
			6	Terwujudnya pemerintahan dan reformasi birokrasi yang akuntabel, bersih dan bebas dari KKN						Indeks Reformasi Birokrasi		
					10)	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
						26	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Pemerintah Daerah	26	Nilai AKIP Pemda	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) & Digitalisasi Pelayanan Publik.		
						27	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah	27	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
				11)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan			Kategori Nilai IPKD				

MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR		PROGRAM PRIORITAS
							usaha peternakan yang terdaftar		sub sektor peternakan (PUSSP) yang berizin	
						39	Meningkatnya luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	39	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	
3	Sumberdaya Alam, Lingkungan & Infrastruktur	9	Terwujudnya pengelolaan penataan ruang dan Kawasan Sentra Produksi sesuai keunggulan komparatifnya						Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				16)	Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang				Tingkat efektivitas pemanfaatan ruang wilayah	
						40	Optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang	40	Persentase Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Tata Ruang dan Penataan Kawasan Sentra Produksi Berkelanjutan
						41	Meningkatnya capaian kinerja penatagunaan tanah	41	Cakupan bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap terpetakan secara berkualitas	
				17)	Meningkatnya daya dukung dan produktivitas Kawasan Sentra Produksi (KSP)				Tingkat kesesuaian komoditas pada KSP	
						42	Terpenuhinya legalitas usaha pertanian	42	Cakupan usaha pertanian berizin	
						43	Meningkatnya lokasi perairan umum yang terjaga kelestarian sumber daya ikannya	43	Cakupan sumber daya kelautan dan perikanan yang terawasi berdasarkan kewenangan kabupaten	
						44	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	44	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi Baik	Irigasi dan Drainase Teratur
		10	Terwujudnya pengelolaan lingkungan (darat/ Lahan, Udara, Air/ Laut) dan persampahan yang aman, nyaman dan berkelanjutan						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
				18)	Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan (darat/Lahan, Udara, Air/ laut)				Kategori Kualitas Lingkungan Hidup	
						43	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	43	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Sumbawa Hijau Lestasi.

MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR		PROGRAM PRIORITAS
						44	Meningkatnya capaian kinerja pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	44	Persentase Capaian Kinerja Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH Daerah	
						45	Meningkatnya Keanekaragaman Hayati yang dikelola	45	Persentase luas pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	
						46	Meningkatnya pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3	46	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha untuk mengelola Limbah B3	
						47	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	47	Cakupan Drainase Perkotaan dalam kondisi baik	
				19)	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang aman dan terkendali			Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan		
						48	Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan	48	Persentase volume sampah tertangani	Lingkungan Bersih dan Bank Sampah
						49	Meningkatnya Infrastruktur Persampahan	49	Cakupan Infrastruktur Persampahan yang terbangun (TPA, TPS, TPST, TPS3R)	
		11	Tersedianya konektivitas antarwilayah dan infrastruktur wilayah, serta mitigasi dan penanganan bencana sesuai kebutuhan pembangunan					Indeks Konektivitas Daerah		
				20)	Meningkatnya konektivitas Infrastruktur kewilayahan			Rasio Konektivitas Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
						50	Meningkatnya keterbukaan informasi public	50	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Sumbawa Terkoneksi Informatif
						51	Terlaksananya SPBE terintegrasi	51	Persentase PD yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	
						52	Meningkatnya Keamanan Informasi	52	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	
				21)	Meningkatnya pembangunan dan/ atau pemanfaatan infrastruktur wilayah			Indeks Infrastruktur Daerah		
						53	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan secara optimal	53	Panjang Jalan yang tertangani	Jaringan Jalan Mantap
						54	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang mendapat akses Air Minum	54	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan	Air Bersih Layak

MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR		PROGRAM PRIORITAS
									terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kab/ kota	
						55	Meningkatnya jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman	55	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	STBM 5 Pilar Tuntas
				22)	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana				Indeks Risiko Bencana	
						56	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	56	Indeks Penerapan SPM Kebencanaan	
						57	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	57	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
4	Perekonomian Maju	12	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, terutama agribisnis/ pertanian dan industri/agroindustri sebagai sektor ekonomi dominan					Laju Pertumbuhan Ekonomi		
				23)	Meningkatnya produktivitas Agribisnis/ Pertanian dalam arti luas (tanaman pangan & hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan-kelautan)				Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (ADHK)	
						58	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan	58	Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Layak. Sistem Pertanian Terpadu.
						59	Meningkatnya Kelompok Tani yang mendapatkan pengamanan, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	59	Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distribusi Pupuk Terjamin Penanganan Harga Dasar Gabah
						60	Meningkatnya Produksi komoditas Peternakan	60	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	Ternak Unggas Maju dan Bersaing
						61	Meningkatnya ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai standar	61	Tingkat ketersediaan prasarana peternakan sesuai standar	
						62	Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	62	Tingkat Pengendalian Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	

MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR		PROGRAM PRIORITAS
						63	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	63	Produksi Perikanan Budi Daya	Pengelolaan Perikanan Produktif
						64	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	64	Produksi Perikanan Tangkap	
				24)	Meningkatnya industri/agroindustri produk unggulan yang berdaya saing				Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan (ADHK)	
						65	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	65	Tingkat Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	Agroindustri Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
						66	Meningkatnya realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	66	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Agroindustri Hasil Hutan Bukan Kayu Agroindustri Peternakan
						67	Meningkatnya jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	67	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	Agroindustri Perikanan Industri Pengelolaan Limbah/Sampah.
						68	Meningkatnya jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik'	68	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	Industri Pakai dan Tenun Samawa.
						69	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan akurat	69	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	
						70	Meningkatnya tingkat fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil (UMK)	70	Usaha Mikro kecil (UMK) yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	UMKM Bersaing.
						71	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi Wirausaha	71	Pertumbuhan Wirausaha pada usaha mikro kecil (UMK)	
						72	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pengawasan UMKM	72	Pertumbuhan Omzet UMKM	
		13	Terwujudnya peningkatan pendapatan per kapita, terutama karena aktivitas jasa perdagangan						PDRB Perkapita	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		25	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Laju Inflasi	
			73 Terselenggaranya pengendalian inflasi	73 Persentase Kebijakan terkait Inflasi yang ditindaklanjuti	Kebutuhan Pokok Terjangkau
	14	Terwujudnya investasi atau penanaman modal yang produktif dan solutif terhadap ekonomi wilayah		Laju Pertumbuhan Investasi	
		26)	Meningkatnya investasi atau penanaman modal yang produktif (kerjasama pemerintah dan dunia usaha)	Nilai Realisasi Investasi	
			74 Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	74 Persentase pemenuhan Dokumen RUPM	Ramah dan Aman Investasi
			75 Meningkatnya Investasi	75 Tingkat Pemenuhan Jumlah Investasi Daerah terhadap Target Jumlah Investasi Provinsi NTB	
			76 Persentase pemanfaatan data perizinan dan non perizinan	76 Tingkat Pemanfaatan Data Perizinan dan Non Perizinan	
			77 Meningkatnya kinerja Pelayanan Penanaman Modal	77 Cakupan Izin yang diterbitkan	
		27)	Meningkatnya aktivitas energi sumberdaya mineral dan pariwisata yang mendukung pertanian/ agribisnis dan industri/ agroindustry	Laju PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Laju PDRB Sektor Pariwisata	
			78 Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	78 Porsi EBT dalam Bauran Energi	
			79 Meningkatnya Usaha pertambangan yang memiliki izin	79 Cakupan Usaha Pertambangan yang difasilitasi perizinannya	
			80 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	80 Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	SAMOTA Pariwisata Ekstotik (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora).
			81 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	81 Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing	
		28)	Meningkatnya perdagangan produk unggulan di pasar local, regional dan nasional	PDRB Sektor perdagangan	
			82 Meningkatnya Penjualan Perdagangan Antar Wilayah	82 Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Bela Beli Produk Lokal (Peduli Pemasaran Produk).
			83 Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	83 Cakupan sarana dan prasarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	
			84 Tersedianya laporan stabilisasi harga barang	84 Jumlah laporan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	

MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR		PROGRAM PRIORITAS
							kebutuhan pokok dan barang penting			
						85	Tersedianya alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	85	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	
						86	Meningkatnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	86	Cakupan Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Koperasi Berprestasi.
						87	Meningkatnya KSP/USP kategori sehat	87	Cakupan KSP/USP kategori sehat	
						88	Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	88	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	
5	Masyarakat Sejahtera	15	Terwujudnya penurunan tingkat kemiskinan penduduk (termasuk kemiskinan ekstrim)						Tingkat Kemiskinan	
			29)	Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi bagi penduduk miskin					Cakupan Penduduk Penerima Beasiswa Pendidikan Universal Health Coverage (UHC) Universal Coverage Jamsostek (UCJ)	
						89	Tersedianya data penerima program JKN dan JKK yang akurat	89	Cakupan Ketersediaan Data Penerima Program JKN PBI Pemda dan JKK (JKK & JKM)	Penanggulangan Kemiskinan
						90	Tersedianya pembiayaan Jaminan kesehatan bagi PBPU & BP	90	Cakupan Pembiayaan Jaminan Kesehatan PBPU & BP	
						91	Tersedianya pembiayaan Jaminan Keselamatan Kerja (kecelakaan dan kematian)	91	Cakupan Pembiayaan Jaminan Keselamatan Kerja (kecelakaan dan kematian)	
						92	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyaluran Bantuan dan Jaminan Sosial	92	Cakupan Penduduk (DTKS) Penerima Program KUBE, PKH, BPNT, YAPI	
			30)	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan					Tingkat Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan Daerah	Ketahanan Pangan Terjamin
						93	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	93	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	
						94	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	94	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	

MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR		PROGRAM PRIORITAS
						95	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	95	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	
						96	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	96	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	
		16	Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
				31)	Meningkatnya Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli Masyarakat			Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Purchasing Power Parity		
						97	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan Pendidikan	97	Cakupan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Pendidikan	Berwirausaha Milenial Cerdas-Sehat-Produktif
						98	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan Kesehatan	98	Cakupan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Kesehatan	
						99	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan perekonomian	99	Cakupan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan perekonomian	
		17	Terwujudnya Pengurangan Pengangguran dan ketimpangan pendapatan Masyarakat					Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Gini		
				32)	Menurunnya Jumlah/Tingkat Pengangguran Terbuka			Laju Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka		
						100	Terlaksananya pendampingan/pembinaan pencari kerja muda (vocasi dan magang)	100	Jumlah pencari kerja muda yang didampingi/dibina	Pencari Kerja Muda Harapan
						101	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan	101	Cakupan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan	
				33)	Menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat			Laju penurunan ketimpangan pendapatan antar Masyarakat		
						102	Terlaksananya pemberdayaan pelaku UMK	102	Jumlah pelaku UMK yang diberdayakan	Ayo Berbagi Rezeki (melalui Zakat, Infaq & Shadaqah)
						103	Terciptanya kemitraan usaha antara pengusaha menengah/ besar dengan pelaku UMK	103	Jumlah kemitraan usaha yang terjalin antara pengusaha menengah/besar dengan pelaku UMK	

Dari Tabel 3.5, diketahui **Program Prioritas Pembangunan Daerah** Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ada sebanyak 45 program sebagai berikut:

Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya (*People, P1*)

1. PAUD Holistik Integratif.
2. Literasi Digital.
3. Beasiswa Pendidikan (Partisipasi Pendidikan Tinggi).
4. STBM 5 Pilar Tuntas (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5 Pilar): (a) Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), (b) Cuci Tangan Pakai Sabun, (c) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah tangga, (d) Pengelolaan Sampah Rumah tangga, dan (e) Pengelolaan Limbah Cair Rumah tangga.
5. Stunting Minimal.
6. Rumah Sakit Tuntas dan Melayani.
7. Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, termasuk Pekerja Rentan.
8. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
9. Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
10. Apresiasi Nilai Budaya
11. Insentif Imam Masjid dan Guru Ngaji.

Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi (*Power, P2*)

12. ASN Profesional, Bersih dan Melayani.
13. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) & Digitalisasi Pelayanan Publik.
14. BUMDes Unggul (Badan Usaha Milik Desa).
15. Intensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah).
16. Perencanaan dan Inovasi Produktif
17. Pengawasan Intensif dan Solutif

Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur (*Planet, P3*)

18. Tata Ruang dan Penataan Kawasan Sentra Produksi Berkelanjutan.
19. Air Bersih Layak.
20. Sumbawa Hijau Lestasi.
21. Lingkungan Bersih dan Bank Sampah.

22. Irigasi dan Drainase Teratur.
23. Sumbawa Terkoneksi Informatif.
24. Jaringan Jalan Mantap.

Perekonomian (*Productivity, P4*)

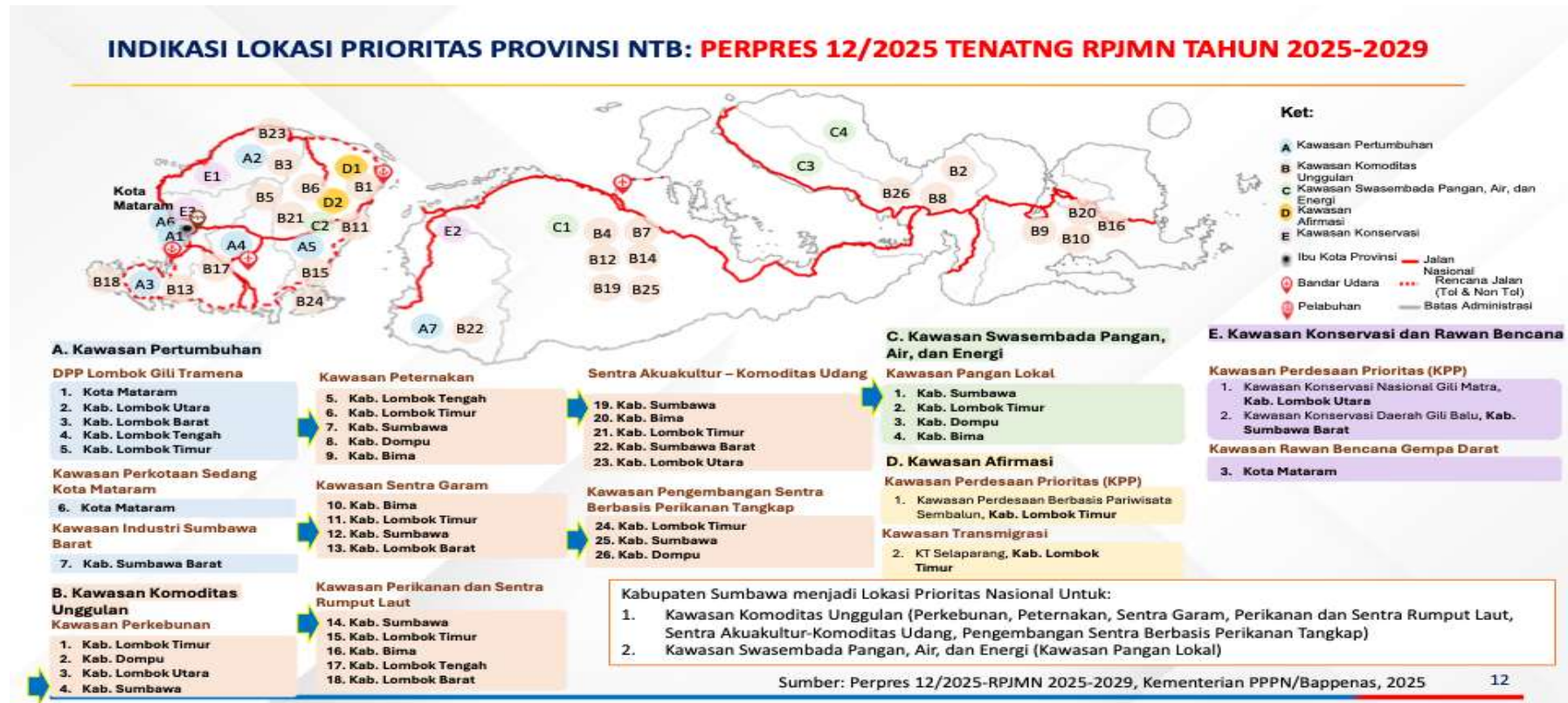
25. Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Layak (termasuk: Distribusi Pupuk Terjamin, dan Pengamanan Harga Dasar Gabah).
26. Ternak Unggas Maju dan Bersaing.
27. Pengelolaan Perikanan Produktif.
28. Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming System*).
29. Agroindustri Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (seperti: Industri Jagung, Industri Pisang, Industri Kelapa, Industri Menteh, Lainnya).
30. Agroindustri Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti: Industri Rotan, Industri Bambu, Industri Madu, Lainnya).
31. Agroindustri Peternakan (seperti: Industri Pakan Ternak, Industri Daging Sapi, Industri Ayam Potong, Lainnya).
32. Agroindustri Perikanan (seperti: Industri Tepung Ikan, Industri Ikan Kaleng/ Kemasan, Lainnya).
33. Industri Pengelolaan Limbah/Sampah.
34. Industri Pakaian dan Tenun Samawa.
35. Koperasi Berprestasi.
36. UMKM Bersaing.
37. Bela Beli Produk Lokal (Peduli Pemasaran Produk).
38. SAMOTA Pariwisata Eksotik (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora).
39. Ramah dan Aman Investasi.

Kesejahteraan Masyarakat (*Prosperity, P5*)

40. Penanggulangan Kemiskinan.
41. Ketahanan Pangan Terjamin
42. Kebutuhan Pokok Terjangkau
43. Berwirausaha Milenial Cerdas-Sehat-Produktif.
44. Pencari Kerja Muda Harapan
45. Ayo Berbagi Rezeki (Zakat, Infaq & Shadaqah).

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Perpaduan Spasial dan Sektoral

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan nasional yang ditentukan dengan perpaduan pendekatan spasial/lokasi dan sektoral/komoditi di Provinsi NTB, termasuk di dalamnya Kabupaten Sumbawa disajikan pada Gambar 3.11 berikut.



Gambar 3.11 Prioritas Pembangunan Perpaduan Spasial dan Sektoral di Provinsi NTB, Termasuk Kab Sumbawa

Dari Gambar 3.11 diketahui prioritas pembangunan nasional di Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 yang ditentukan dengan perpaduan pendekatan spasial/lokasi dan sektoral/komoditi sebagai berikut:

1. **Kawasan Komoditas Unggulan (B):** Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan, Kawasan Sentra Garam, Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut, Kawasan Akuakultur-Komoditas Udang, dan Kawasan Pengembangan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap.
2. **Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (C):** Kawasan Pangan Lokal.

Prioritas pembangunan Provinsi NTB untuk Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 yang ditentukan dengan perpaduan pendekatan spasial dan sektoral adalah **Pengembangan Pariwisata di Kawasan SAMOTA** (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora) sebagai Kawasan Strategis Provinsi NTB. Regulasi dan rencana pengembangan Kawasan SAMOTA disajikan pada Gambar 3.12 s.d Gambar 3.16 berikut.

Swimming With Whalesharks

Salehbay Whalesharks
"Make Your Travel Dreams Come True"

PRIVATE TOUR

Total/ group	Price / person (IDR)	What's included
1 ppl	2500K	• Breakfast
2 ppl	1400K	• Coffee & Tea
3 ppl	1000K	• Mineral Water
4 ppl	800K	• Towel
5 ppl	700K	• Snorkeling equipment (Mask, Snorkel/Fins)
6 ppl	600K	• Safety Helm (1/1/1)
7 ppl	550K	• Tour Guide
8 ppl	500K	• Photographer
		• Proforma
		• Entrance fee
		• Boat Trip

SHARING TOUR

Price/Person (IDR)	600k
--------------------	------

Meeting Point: Labuan Jambu Village

Itinerary:

- Meet up on the boat
- 0.5 hour cruise off the coastline
- Snorkeling with whale sharks
- Return to the boat
- 0.5 hour cruise off the coastline
- Finish

Book now +62 813 3773 7854

SAMOTA

Pulau Moyo **Gunung Tambora**

Teluk Saleh

6 Komoditas Andalan Samota

Rumput Laut	Udang	Karapu	Ikan Tangkap	Bandeng	Ubur-ubur
-------------	-------	--------	--------------	---------	-----------

Luas Samota	572.471 Ha
Luas Daratan	360.171 Ha
Luas Perairan	212.300 Ha
Kecamatan/Desa	15/8

Sumber: Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Samota Provinsi NTB

Gambar 3.12 Peta Eksisting Kawasan SAMOTA (Teluk Saleh, Pulau Moya dan Gunung Tambora)

KAWASAN SAMOTA SEBAGAI EPISENTRUM PEMBANGUNAN PULAU SUMBAWA



Gambar 3.13 Regulasi Pengembangan Kawasan SAMOTA sebagai Episentrum Pembangunan Pulau Sumbawa

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024 RTRW PROVINSI NTB TAHUN 2024-2044:
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) SAMOTA



- Pengembangan sektor pariwisata, industri dan perikanan yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah yang tinggi
- Penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan pariwisata dan perikanan
- Pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung dan cagar biosfer dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan
- Pengembangan dan pengendalian Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dalam menciptakan Kawasan yang aman, nyaman, harmonis dan produktif
- Peningkatan Peran Masyarakat dalam pengembangan Kawasan
- Pengelolaan mitigasi bencana dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan

Sumber: RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044

Gambar 3.14 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan SAMOTA Tahun 2024-2044

KAWASAN SAMOTA: EKONOMI BIRU YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN



Gambar 3.15 Master Plan Pembangunan Kawasan SAMOTA Tahun 2025-2029: Ekonomi Biru yang Inklusif dan Berkelanjutan

AGENDA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS SAMOTA TAHUN 2025-2029



2025

2029

Pemerintah Pusat

- Desain konstruksi Pelabuhan Ai' Bari, pembangunan konstruksi, dan pembangunan fasilitas darat (Kemenhub)
- Kelembagaan Pelabuhan (Kemenhub)
 - Penyediaan kapal ferry (Kemenhub, ASDP)
 - Jalan akses ke Pelabuhan/Penyelesaian Jalan Bypass Samota 1,5 km (Kementerian PUPR)
- Penyediaan air bersih (Kementerian PUPR)
 - Penataan Permukiman Ai' Bari (Kementerian PKP)
 - Kelistrikan (PLN)

Pemerintah Provinsi

- Pembangunan konstruksi Pelabuhan Ai' Bari
- Pembangunan fasilitas darat untuk Pelabuhan Ai' Bari
 - Kelembagaan/tata kelola Pelabuhan (penyeberangan lintas kabupaten)

Pemerintah Kab. Sumbawa

- Pembangunan fasilitas darat untuk Pelabuhan Ai' Bari dan Calabai
 - Penyediaan air bersih
 - Penataan permukiman Ai' Bari

Sumber: Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Samota Provinsi NTB

Gambar 3.16 Agenda Pengembangan Infrastruktur Kawasan SAMOTA Tahun 2025-2029